

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DIREKSI DAN KOMISARIS PT SARINAH (PERSERO)**

Sebagai wujud keterbukaan informasi publik, PT Sarinah (Persero) menyampaikan LHKPN Direksi dan Komisaris Holding. Data yang disajikan merupakan data terbaru hingga September 2026 berdasarkan e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

[DOKUMEN SELENGKAPNYA→](#)

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
PT SARINAH (PERSERO)**

DIREKSI



**Raisha Syarfuhan
Direktur Utama**



**Citra Pandansari
Direktur Operasi**



**Guntur P.M Siahaan
Direktur Keuangan dan
Manajemen Resiko**



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT SARINAH
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAISHA SYARFUAN
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 1000471

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	22.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 546 m2/229 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 22.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.600.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	775.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	26.375.000.000

III. HUTANG Rp. 85.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 26.290.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT SARINAH
UNIT KERJA : DIREKTORAT OPERASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CITRA PANDANSARI
2. Jabatan : DIREKTUR OPERASI
3. NHK : 1000871

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	140.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	115.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.065.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.400.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	415.000.000
Sub Total	Rp.	4.635.000.000

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.635.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT SARINAH
UNIT KERJA : DIREKTORAT KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNTAR PASUMAN MANGAPUL SIAHAAN
2. Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO
3. NHK : 219825

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/340 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **2.540.000.000**

1. MOBIL, NISSAN PATROL Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOTOR, VESPA VBB Tahun 1962, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. MOBIL, WULING AIR EV Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. MOBIL, MERCEDES BENZ W140 S320 Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. MOTOR, HARLEY DAVIDSON ELECTRA POLICE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
7. MOTOR, BMW GS1200K25 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **480.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **178.562.617**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **170.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.368.562.617

III. HUTANG

Rp. 3.409.003.157

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.959.559.460

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
PT SARINAH (PERSERO)**

KOMISARIS



Dyah Roro Esti Widya Putri
Komisaris Utama



Nila Safitri
Komisaris Independen



Annette Liana Dewi
Komisaris



Barry Tamin
Komisaris Independen



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI
2. Jabatan : WAKIL MENTERI
3. NHK : 620038

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	7.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/142 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 7.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	600.000.000
1. MOBIL, MINI COOPER MINI COOPER LCI F56 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	175.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.619.700.252
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	22.894.700.252

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	22.894.700.252

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT SARINAH
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNETTE LIANA DEWI
2. Jabatan : KOMISARIS
3. NHK : 1000878

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.500.000.000
1. Bangunan Seluas 299 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	300.000.000
1. MOBIL, MINI MINI COOPER S AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	400.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	51.480.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.400.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.651.480.000

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **11.651.480.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.